

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Selasa, 9 September 2024
Wilayah	Kabupaten Luwu



## APBD Luwu Timur di Ambang Bangkrut

# APBD Luwu di Ambang Bangkrut

### Defisit Rp17 M, Gagal Jual Aset

REPORTER **SYAHRUDDIN SYAH**  
EDITOR **RIDWAN MARZUKI**

**BELOPA, FAJAR—Tak ada pilihan selain rasionalisasi. Jika APBD dipaksakan, keuangan Luwu bisa bangkrut.**

**ANGGARAN** Pemkab Luwu mengalami defisit Rp17 miliar. Awalnya, mereka hendak menjual aset berupa jalan kepada pengusaha, namun hal itu gagal dilakukan.

Pendapatan asli daerah yang minim, membuat APBD makin sulit. Sebenarnya, opsi menjual jalan di Kecamatan Latimojong diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menjadi solusi menutupi defisit. Namun, itu tak terealisasi.

"Kondisi ini membuat APBD Luwu mengalami defisit," kata Kepala BPKD Luwu Alamsyah, pekan lalu.

Awalnya, tim anggaran pemerintah daerah telah memasukkan anggaran penjualan jalan ke dalam pendapatan daerah senilai Rp25 miliar. Rencana penjualan telah melalui semua tahapan. Termasuk disepakati bersama dewan melalui rapat paripurna.

Akan tetapi, saat pengumuman penjualan aset, ada penyampaian dari Kejaksaan Negeri Luwu untuk tidak melanjutkan kegiatan tersebut. Sebab, berdampak pada proses hukum.

Penjualan jalan dinilai melanggar Permendagri Nomor 9/2012 tentang Pemeliharaan Aset. Isinya, aset tanah tidak bisa dijual. Hanya aset bangunan dan aset bergerak (berupa mobil dan motor) yang dapat dilelang. Akibatnya, proses penjualan dihentikan.

"Untung kita tidak jual. Kalau dijual, bisa kita masuk ranah hukum," sambung Alamsyah.

Yang dapat dilakukan pada jalan tersebut hanya penyertaan modal.

Namun, langkah ini belum bisa diambil lantaran perusahaan tambang emas di Latimojong belum beroperasi.

Selain itu, sistem sewa dapat dilakukan. Namun, harus ada jalan lain yang dibangun sebagai alternatif bagi masyarakat.

"Sistem ini yang akan digunakan. Makanya kita bangun jalan dari Bone Posi menuju Kadundung sebagai alternatif. Namun, belum rampung," paparnya.

Faktor lain yang memperbesar defisit adalah dana bagi hasil dari Pemprov Sulsel yang hanya turun Rp3 miliar. Itupun hanya Januari. Padahal, dalam APBD Luwu dicatatkan Rp6,76 miliar.

Langkah yang dilakukan saat ini hanya rasionalisasi anggaran setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Luwu.

### Dewan Ingatkan

Anggota DPRD Luwu Akbar Sunali meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar masalah defisitnya anggaran akibat salah perencanaan penjualan aset daerah. "Kita tidak ingin APBD Luwu kedepan mengalami lagi defisit," kata Akbar.

Anggota DPRD Luwu Wahyu Napeng mengatakan selama ini memang selalu mengingatkan agar tidak salah dalam mengambil kebijakan anggaran.

"Kami di DPRD Luwu tidak ingin agar bapak-bapak di eksekutif salah langkah dan berdampak proses hukum," paparnya. (shd/zuk)